

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis uraikan di atas, maka Penulis menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari ketepatan waktu Wajib Pajak dalam membayar serta menyampaikan jumlah SPT Masa dan SPT Tahunan.
2. Pelaksanaan sanksi administrasi yang dilaksanakan oleh KPP Bekasi cukup mengalami keberhasilan dan diharapkan Wajib Pajak akan semakin patuh sehingga tidak ada lagi Wajib Pajak yang dikenakan sanksi bunga maupun denda di tahun yang akan datang.
3. Sanksi administrasi memegang peranan dan pengaruh cukup besar untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pelaksanaan sanksi administrasi belum dijalankan secara maksimal sehubungan dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, selain itu kurangnya jumlah aparatur pajak yang tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak dan kurangnya infrastruktur pada KPP Bekasi.
5. Dari perhitungan Analisis Regresi Berganda, pada Uji Korelasi Pearson hanya variabel X<sub>2</sub> (SKPKB) yang terdapat pengaruh terhadap variabel Y (Wajib Pajak Efektif), sedangkan pada Uji t tidak ditemukan pengaruh yang kuat

antara variabel X1 (STP) dan variabel X2 (SKPKB) terhadap variabel Y (Wajib Pajak Efektif), untuk Uji F (ANOVA) antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y terdapat pengaruh, serta pada Uji Asumsi Otokorelasi dalam hasil penelitian tidak terjadi Otokorelasi dan Multikolinearitas. Kontribusi variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 62,6% dan selebihnya sebesar 37,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain tersebut adalah Wajib Pajak yang patuh dan Wajib Pajak Baru.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, Penulis mengajukan beberapa saran atau usulan perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Bekasi:

1. Sebaiknya Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan/Atau Denda Atas Pajak Penghasilan 21 di KPP Bekasi lebih ditingkatkan agar kepatuhan Wajib Pajak dapat dioptimalkan.
2. Kebutuhan sumber daya aparatur pajak baik secara kualitas maupun kuantitas perlu diprioritaskan terutama di seksi PPh Badan dan Pemotongan dan Pemungutan mengingat besarnya volume dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, infrastruktur sebaiknya diperbaiki mengingat kondisi di KPP Bekasi yang bisa dikatakan kurang memadai.
3. Peranan dan pengaruh sanksi administrasi cukup besar dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, untuk itu diperlukan kegiatan penyuluhan di KPP

Bekasi yang perlu ditingkatkan terutama untuk Wajib Pajak yang baru agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kegiatan penyuluhan ini sebaiknya tidak hanya di KPP Bekasi saja, tetapi juga melalui media elektronik maupun media massa.



## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani.

Brotodihardjo R, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Aditama.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

M Echols, John dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prasetya, Adinur dkk. 2006. *Tinjauan Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphat. 2004. *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.

Suharyadi dan Purwanto. 2003. *Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Sulaiman, Wahid. 2004. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. Tambun: Andi.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

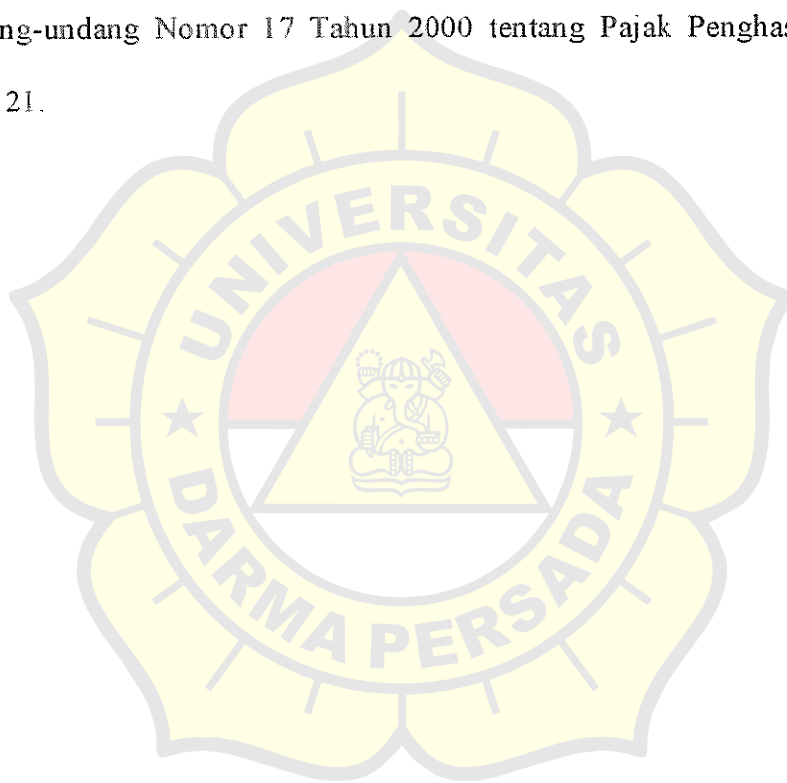
www. Google. Com. 2006. *Administrasi Pajak*. Jakarta.

Undang-undang dan Peraturan:

\_\_\_\_\_ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 1994 dan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

———— Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ssebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI

Jl. Sersan Aswan 407 – Margahayu, Bekasi 17113

Telp (021) 8808059

Layanan Pengaduan Masyarakat : <http://kontakibb3.pajak.go.id>, e-mail : [kontakibb3@pajak.go.id](mailto:kontakibb3@pajak.go.id)

Call Center/Fax : 021-8866669, SMS Center : 0818-11-JBB3 (0818-11-5223)

Fax (021) 8802525

## SURAT KETERANGAN

Nomor: Ket. 42 / WPJ.22/KP.0101/2007

Saya yang bertanda tangan dibawah ini memberi keterangan bahwa:

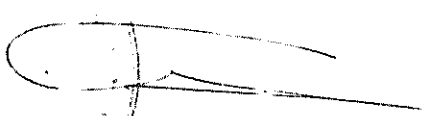
Nama : Fitria Rachmawati  
NIM : 03420040  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi Universitas Darma Persada

Telah melakukan Praktek Kerja Lapangan/Magang (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi mulai tanggal 01 Maret 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 di Seksi Penagihan dan di Seksi P2 PPh.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Mei 2007

Korlak Kepegawaian

  
Farid Baheramsyah

NIP. 060048386

**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : *Fitria Rachmawati*  
 NIM : *03420040*  
 DOSEN PEMBIMBING : *Drs. Boedy Setyo : H, Ak. MM*

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	<i>15 Maret '07</i>	<i>SEJARAH KPP BEKAS SETRUKTUR ORGANISASI DAN TUGASNYA</i>	<i>[Signature]</i>
II	<i>27-03-07</i>	<i>Mapalah Runglun</i>	<i>[Signature]</i> <i>27/3/07</i>
III	<i>10-04-'07</i>	<i>Lampiran - Runglun</i>	<i>[Signature]</i> <i>JAHIRIN</i>
IV	<i>26-04-07</i>	<i>Informasi data yang diperlukan</i>	<i>[Signature]</i> <i>BODY.S</i>
V			
VI			

Tanggal mulai bimbingan : \_\_\_\_\_

Tanggal selesai bimbingan : \_\_\_\_\_

**CATATAN :**  
 Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.







FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : FITRIA RACHMAWATI

NIM : 03420040

DOSEN PEMBIMBING : DRS. BOEDY SETYO. H, AK. MM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	14-3-2007	Bab I	
II	6-4-2007	Bab I Revisi	
III	11-4-2007	Bab II	
IV	27-4-2007	Bab II Revisi	
V	4-5-2007	Bab III	
VI	25-5-2007	Bab III Revisi	

Tanggal mulai bimbingan : 14/3/07

Tanggal selesai bimbingan : \_\_\_\_\_

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.





FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FITRIA RACHMAWATI

NIM : 03420040

DOSEN PEMBIMBING : DRS. BOEDY SETYO. H, AK. MM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	1 - 6 - 2007	Bab IV	
II	4 - 7 - 2007	Bab IV Revisi	
III	13 - 7 - 2007	Bab V	
IV	16 - 7 - 2007	Semua Bab disetujui	
V			
VI			

Tanggal mulai bimbingan : \_\_\_\_\_

Tanggal selesai bimbingan : 16.07.07

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BEKASI

**SURAT TAGIHAN PAJAK**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Nomor : 00278/101/01/407/01

Masa / Tahun Pajak : Januari s.d Desember 2001

Tanggal Penerbitan : 02-11-2004

Tanggal Jatuh Tempo : 02-12-2004

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Nama : PT. SARITAMA FOOD PROCESSING

N P W P : 010715563-407.001

Dan penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar

Rp. 0

2. Sanksi Administrasi :

a. Denda Pasal 7 KUP

Rp. 550.000

b. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2)

Rp. 1.938.282

c.

Rp. 0

d. Jumlah sanksi administrasi

Rp. 2.488.282

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2 d)

Rp. 2.488.282

! Dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah

KEPADA

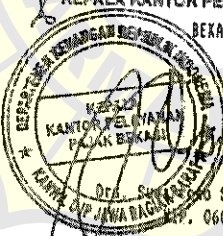
PT. SARITAMA FOOD PROCESSING

L. RAYA HAROSONG KM 12,5 RT/RW: 03/06

IKIMUL BANTAR GEBANG

OTAKADYA BEKASI - 17310

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BEKASI





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
 (SSP)**

LEMBAR **1**  
 Untuk Arsip WP

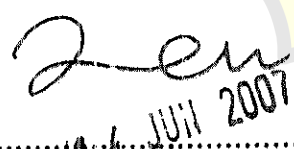
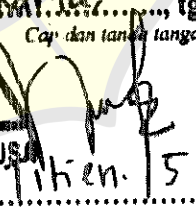
PWP : **02 . 173 . 405 . 0 . 017 . 000**  
 sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki  
 NAMA WP : **PT. INDORAYA SARI NUSA**  
 ALAMAT : **Jl. AMPERA RAYA NO. 62-A, RT 01/04  
 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jak-Sel, 12560**

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<b>111121</b>	<b>300</b>	<b>- STP PPH Psl 21 -</b>

Masa Pajak											Tahun	
n	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<b>2003</b>
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												<i>Diisi tahun terutangnya p-jak</i>

Nomor Ketetapan : **00879 / 101 / 03 / 017 / 07**  
 sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>dengan rupiah penuh</i> <b>100,000,-</b>	Terbilang : <b>- SERATUS RIBU RUPIAH -</b>
---	---

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <b>14 JUNI 2007</b>	Wajib Pajak/Penyetor <b>Jakarta</b> , tgl <b>14 Juni 2007</b> <i>Cap dan tanda tangan</i>  <b>PT INDORAYA SARI NUSA</b> Nama Jelas : <b>ti hen. 15</b>
--	---

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR  
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / ~~BADAN~~

Nomor : 00081/205/03/407/06

Tahun Pajak : 2003

Tanggal Penerbitan : 06-02-2006

Tanggal Jatuh Tempo : 08-03-2006

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 telah dilakukan pemeriksaan dan / atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama : RENFI SYAILENDRA

N P W P : 07.300.312.5-407.000

II. Dari pemeriksaan dan / atau keterangan lain tersebut diatas penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Neto	Rp.	183,345,038
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp.	176,145,000
3. Pajak Penghasilan yang terutang	Rp.	30,286,250
4. Kredit Pajak :		
a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain :		
a.1. PPh Pasal 21	Rp.	18,137,573
a.2. PPh Pasal 22	Rp.	0
a.3. PPh Pasal 23	Rp.	4,837,500
a.4. Lain-lain	Rp.	0
a.5. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4)	Rp.	22,975,073
b. Dibayar sendiri :		
b.1. PPh Pasal 22	Rp.	0
b.2. PPh Pasal 24	Rp.	0
b.3. PPh Pasal 25	Rp.	39,440
b.4. PPh Pasal 29	Rp.	6,856,321
b.5. Lain-lain	Rp.	0
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp.	6,895,761
c. Diperhitungkan (Pokok) STP	Rp.	0
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5 + b.6 + c)	Rp.	29,870,834
5. Pajak yang tidak / kurang dibayar (3 - 4.d)	Rp.	415,416
6. Sanksi administrasi :		
a. Bunga Pasal 13 (2)	Rp.	199,400
b.	Rp.	0
c.	Rp.	0
d. Jumlah sanksi administrasi	Rp.	199,400
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6.d)	Rp.	614,816

# ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU DELAPAN RATUS ENAM BELAS RUPIAH #

KEPADA

RENFI SYAILENDRA  
JL. Kayu Tinggi 18 RT 05/04  
BINTARA JAYA  
BEKASI BARAT  
KOTAMADYA BEKASI

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BEKASI

W I D O D O  
NIP.060076906



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR  
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN**

Nomor : 00045/406/04/407/06

Tahun Pajak : 2004

Tanggal Penerbitan : 13-09-2006

I. Berdasarkan Pasal 17 atau 17B Undang-undang No. 9 Tahun 1994 Jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak nomor : tanggal telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan

kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama : GV. ABC

N P W P : 02.271.367.1-407.000

Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang lebih bayar / seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Neto	Rp.	48,787,342
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp.	48,787,000
3. Pajak Penghasilan yang terutang	Rp.	4,878,700

4. Kredit Pajak :

a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain :

a.1. PPh Pasal 21	Rp.	0
a.2. PPh Pasal 22	Rp.	0
a.3. PPh Pasal 23	Rp.	6,867,190
a.4. Lain-lain	Rp.	0
a.5. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4)	Rp.	6,867,190

b. Dibayar sendiri

b.1. PPh Pasal 22	Rp.	0
b.2. PPh Pasal 24	Rp.	0
b.3. PPh Pasal 25	Rp.	0
b.4. PPh Pasal 29	Rp.	0
b.5. Lain-lain	Rp.	0
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp.	0

c. Diperhitungkan (Pokok)

STP	Rp.	0
-----	-----	---

d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5. + b.6. + c)

	Rp.	6,867,190
--	-----	-----------

5. Pajak Penghasilan yang lebih dibayar / seharusnya tidak terutang (3 - 4.d)

	Rp.	1,988,490
--	-----	-----------

# Satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah #

tatan :

apabila dalam Butir / tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1994, pendaftar harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

KEPADA

GV. ABC  
02.271.367.1-407  
JL. MUSHOLA AL TAUFIK NO.100  
KRANJI  
BEKASI BARAT  
KOTAMADYA BEKASI

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BEKASI

W I D O D O  
NIP.060076906



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL  
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN**

Nomor : 00030/205/04/407/06

Tahun Pajak : 2006

Tanggal Penerbitan : 13-06-2006

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama : CV. ABC

NPWP : 02.271.367.1-407.000

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto (Rugi)	Rp.	0
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp.	0
3. Pajak Penghasilan yang tertutang	Rp.	0
4. Kredit Pajak:		
a. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:		
a.1. PPh Pasal 21	Rp.	
a.2. PPh Pasal 22	Rp.	
a.3. PPh Pasal 23	Rp.	
a.4. Lain-lain	Rp.	
a.5. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4)	Rp.	0
b. Dibayar sendiri:		
b.1. PPh Pasal 22	Rp.	
b.2. PPh Pasal 24	Rp.	
b.3. PPh Pasal 25	Rp.	
b.4. PPh pasal 29	Rp.	
b.5. Lain-lain	Rp.	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp.	0
c. Diperhitungkan (Pokok STP)	Rp.	0
5. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5+b.6+c)	Rp.	0
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3-4.d)	Rp.	<b>NIHIL</b>

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar sendiri, dipotong dan/atau dipungut pihak lain SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan yang tertutang menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1994.

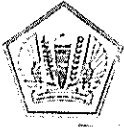
KEPADA

CV. ABC  
02.271.367.1-407  
JL. BALAI RAKYAT NO.3 RT 05/04  
KRANJI  
BEKASI BARAT  
KOTAMADYA BEKASI

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BEKASI

W I D O D O  
NIP.060076906





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **2**  
Untuk KPP melalui KPPN

NPWP : 0 2 . 1 7 3 . 4 8 5 . 0 - 0 1 7 . 0 0 0

*Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : PT. INDORAYA SARI NUSA

ALAMAT : JL. AMPERA RAYA NO.62A, RT 01/04, KEL.CILANDAK TIMUR  
KEC. PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12560

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 6 2 1 1 0 0

Uraian Pembayaran

PPh PASAL 21

Masa Pajak

Jan Peb Mar Apr ~~MAY~~ Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Tahun

2 0 0 7

*Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan*

*Disi tahun terangnya pajak*

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

*Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

*Disi dengan rupiah penuh*

Rp. 0,-

Terbilang :

NIHIL

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal ....15. Mei 2007

*Cap dan tanda tangan*

Faria. R

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

....Jakarta...., tgl ....15. Mei 2007

*Cap dan tanda tangan*

ARYA SOMA

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

**3**

Untuk dilaporkan  
Oleh WP ke KPP

NPWP : 0 2 1 7 3 4 8 5 0 - 0 1 7 0 0 0

*Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : PT. INDORAYA SARI NUSA

ALAMAT : JL. AMPERA RAYA NO.62A, RT 01/04, KEL.CILANDAK TIMUR

.KEC..PASAR..MINGGU., JAKARTA..SELATAN., 12560.

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

0 1 1 6 2 1 1 0 0

PPH PASAL 21

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr ~~Mei~~ Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 7

*Beri tanda silang pada salah satu bulan untuk masa yang berakhir*

*Disi tahun terutangnya pajak*

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

*Catut sesuai Nomor Ketetapan : STP, SSPKR, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

Terbilang

*Disi dalam rupiah penuh*

0,-

NTIII

Rp.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 15 Mei 2007

*Cap dan tanda tangan*

*[Signature]*  
Fitria.R

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Jakarta

..... tgl 15 Mei 2007

*Cap dan tanda tangan*

*[Signature]*  
ARYA.SOMA

Nama Jelas :

ARYA.SOMA

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

NPWP : 0 2 . 1 7 3 . 4 8 5 . 0 - 0 1 7 . 0 0 0  
Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. INDORAYA SARI NUSA

ALAMAT : JL. AMPERA RAYA NO.62A, RT 01/04, KEL.CILANDAK TIMUR  
 ..KEC.,PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN.12560.....

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

0 1 | 1 6 2 | 1 | 1 0 0 PPh PASAL 21

Masa Pajak Tahun

Jan	Peb	Mar	Apr	<del>Mei</del>	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 7	
-----	-----	-----	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--

Berilah tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Disi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / /

Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang

Disi dalam angka sudah pemb Rp. 0,- NIHL

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal 15 Mei 2007  
Cop dan tanda tangan

*Fitria R*  
Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor  
Jakarta..... tgl 15 Mei 2007  
Cop dan tanda tangan

*Arya*  
Nama Jelas : ARYA SOMA

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Disi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

**5**

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

NPWP : 0 2 1 7 3 4 8 5 0 - 0 1 7 0 0 0

*Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : PT. INDORAYA SARI NUSA

ALAMAT : JL. AMPERA RAYA NO. 62A RT. 01/04, KEL. CILANDAK TIMUR  
KEC. PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12560

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 6 2 1 1 0 0

Uraian Pembayaran

PPh PASAL 21

Masa Pajak

Jan Peb Mar Apr **Mei** Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

*Disi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan*

Tahun

2 0 0 7

*Disi tahun terutangnya pajak*

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

*Disi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

*Disi dengan caprah pemb*

0,-

Terbilang

PPh PASAL 21

Rp.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal 15 Mei 2007

*Cap dan tanda tangan*

*[Signature]*  
Fitria. R

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyector

Jakarta tgl 15 Mei 2007

*Cap dan tanda tangan*

*[Signature]*  
ARYA SOMA

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

200701



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Psr Minggu (1)  
di Jakarta,

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26**

Identitas Pemotongan Pajak:

NPWP : 02.173.489.0-017.000 (2)

Nama : PT. INDRAYA SARI NUSA

Alamat : Jl. Gempura Raya 02-A, Rt. 01/04, Kel. Glandak Timur, Jaksel.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Mei tahun 2007 (3)  
dan telah disetor tanggal 15 Mei 2007 (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan (4)	PPh yang dipotong (PPh) (5)
Pegawai Tetap	0111/100	.....	.....	.....
Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutanganya ditanggung Pemerintah	-	.....	.....	.....
Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100	.....	.....	.....
Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	.....	.....	.....
Pegawai Satuan	0111/100	.....	.....	.....
Pegawai Borongan	0111/100	2	Rp. 300.000,-	.....
Pegawai Honorer	0111/100	.....	.....	.....
Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100	.....	.....	.....
Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100	.....	.....	.....
Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	.....	.....	.....
Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	.....	.....	.....
Distributor MLM/direct selling	0111/100	.....	.....	.....
Tenaga Ahli	0111/100	.....	.....	.....
Penerimaan Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100	.....	.....	.....
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0111/100	.....	.....	.....
JUMLAH			Rp. 600.000,-	.....
perhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				.....
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan*) sebelumnya yang belum diperhitungkan				.....
Keterangan:				

Hal yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final

Penerima Penghasilan	MAP/ KIS	Jumlah Pendapatan Penghasilan	Jumlah Pendapatan Bruto (RP)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401	.....	.....	.....
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100	.....	.....	.....
JUMLAH		.....	.....	.....
Terbilang: .....				

\*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

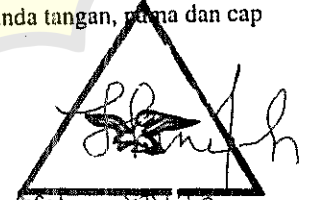
- ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ..... lembar.
- ( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- ( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ..... lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jakarta 15 Mei ..... 2007 (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)  
Tanda tangan, nama dan cap



PT. INDORAYA SARI NUSA ..... (8)



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR  
**1721**

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

2005

NPWP PEMOTONG PAJAK: 002 11713 11815 01 0117 01010

NAMA PEMOTONG PAJAK: P.T. INDRAMA SARI MUSA

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: JL. AMPERA RAYA NO. 62A

KELURAHAN / KECAMATAN: CILANDAU TIMUR

KOTA: JAKARTA SELATAN

NO. TELEPON / FAKSIMILI: 021-78843564

JENIS USAHA: PERDAGANGAN DAN AGENT / SUPPLIER

NAMA PIMPINAN: IK. WIZAR RISWANTO

KODE POS: 12560

KLU: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

A. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI		JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)
(1)		(2)	(3)	(4)
1	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIH ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (Diisi dari Formulir 1721-A)	2 orang	nihil	Nihil
2	PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1721-B)	-	-	-
3	JUMLAH (1 + 2)	2 orang	nihil	Nihil
4	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi dari Formulir 1721-A dan 1721-B)			
5	PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka 3 kolom 4 - Angka 4)			
6	PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
7	STP PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 (Hanya Pokok Pajak)			
8	JUMLAH (6 + 7)			
9	a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8)			
	b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - Angka 5)			

JUMLAH PADA ANGKA 9 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL

B. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 UNTUK BULAN TAHUN

C. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	5. <input type="checkbox"/> DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN
2. <input type="checkbox"/> DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PPh-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH	6. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
3. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS	7. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI IKTA KARYAWAN ASING
4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT	8. _____

D. PERNYATAAN DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

JAKARTA, 8 MARET 2006  
(Tempat) (Tanggal)

PT. INDRAMA SARI MUSA



LAMPIRAN I  
**SPT TAHUNAN**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

FORMULIR  
**1721 - A**

**DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU  
 TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN  
 HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

TAHUN TAKWIM

2005

NPWP PEMOTONG PAJAK

02 143 485 0 017 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

PT. INDRAYA SARI NUSA

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	IL. YUSAR RISWANTO	6.482.9278024	-	-	-
2	ISMET DJAMAL TAHIR	06.1852646016-000	-	-	-
• JUMLAH - YANG MEMPUNYAI NPWP > 2 ORANG - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP > 2 ORANG					
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP > 2 ORANG					
C. JUMLAH A + B > 2 ORANG					

Catatan:  
 1. Pindahkan jumlah orang pada C ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (2)  
 2. Pindahkan jumlah C kolom (4) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (3)  
 3. Pindahkan jumlah C kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (4)  
 4. Pindahkan jumlah C kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4



LAMPIRAN I-A  
SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP  
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK  
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI  
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR  
1721 - A1

TAHUN TAKWIM  
2005

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT  
NPWP PEMOTONG PAJAK: 0211734850017000  
NAMA PEMOTONG PAJAK: PT INDRAMAYA SADI NUSA  
ALAMAT PEMOTONG PAJAK: JL. ANGERA RAYA NO. 62A G. LANDAKTAUR JAK-SBL  
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: IR. YUSAR PASWAN TO  
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: 0164829278027000  
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Jl. KEBON. KOSONG Gg-12/706 JAK-PUS  
JABATAN: DIREKTUR  
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARAWAN ASING:  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING  
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/..... TK/..... HB/.....  
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: .....

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:		(Rupiah)
<b>● PENGHASILAN BRUTO</b>		
1	GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	Nilai
2	TUNJANGAN PPh	
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	
4	HONORARIUM DAN IMBALAH LAIN SEJENISNYA	
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7	JUMLAH (1 s.d 6)	
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	
<b>● PENGURANGAN</b>		
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	
12	URAN PENSIUN ATAU URAN THT / JHT	
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	
<b>● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	8.640.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILLINASI	
25	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	
26	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ..... TAHUN TELAH	

B  PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

JAWA 8 MARET 2006  
(Tempat) (Tanggal)



LAMPIRAN I-B  
**SPT TAHUNAN**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

LBR. 1 : UNTUK KPP  
 LBR. 2 : UNTUK BENDAHARAWAN PEMOTONG PAJAK  
 LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI,**  
**PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA**

FORMULIR  
**1721 - A2**

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM  
**2005**

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

NOMOR URUT

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN

NPWP BENDAHARAWAN

NAMA BENDAHARAWAN

ALAMAT BENDAHARAWAN

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN

NIP / NRP

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN

PANGKAT / GOLONGAN

JABATAN

STATUS DAN JENIS KELAMIN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

PP. INDRAYA SARI NUSA

02 173 185 0 017 000

JLAMPERA RAYA NO.62A CILAHAK JAW. SEL.  
ISABT. DJANN TAHR

06 185 264 6 016 000

Komisaris

KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN

K/ TK/ HB/

s.d.

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	>	Rp <u>Nilai</u>
2.	TUNJANGAN ISTERI	>	Rp <u>-</u>
3.	TUNJANGAN ANAK	>	Rp <u>-</u>
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	>	Rp <u>-</u>
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	>	Rp <u>-</u>
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	>	Rp <u>-</u>
7.	TUNJANGAN BERAS	>	Rp <u>-</u>
8.	TUNJANGAN KHUSUS	>	Rp <u>-</u>
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	>	Rp <u>-</u>
10.	JUMLAH (4+5+6+7+8+9)	>	Rp <u>-</u>
• PENGURANGAN			
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	>	Rp <u>-</u>
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	>	Rp <u>-</u>
13.	JUMLAH PENGURANGAN (11+12)	>	Rp <u>Nilai</u>
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)	>	Rp <u>-</u>
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	>	Rp <u>-</u>
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (FTKP)	>	Rp <u>2.800.000</u>
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16)	>	Rp <u>-</u>
18.	PPh PASAL 21 TERUTANG	>	Rp <u>-</u>
19.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	>	Rp <u>-</u>
20.	JUMLAH PPh PASAL 21	>	Rp <u>-</u>
	<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19)		
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)		

B. • PEGAWAI TERSEBUT  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSIUN

C. JAKARTA 8 MARET 2006  
 (Tempat) (Tanggal)  
 BENDAHARAWAN  
IR. YUSUF DISWANTO  
 NIP / NRP



LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR  
1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN  
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN  
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK  
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2015!

NPWP PEMOTONG PAJAK : 012 1143 4816 01 014 0000  
NAMA PEMOTONG PAJAK : PT INDRAMAYA SARI NUSA

RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>• <b>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</b></p> <p>1. PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK .....ORANG</p> <p>2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK .....ORANG</p> <p>3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK .....ORANG</p> <p>4. KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK .....ORANG</p> <p>5. DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK .....ORANG</p> <p>6. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK .....ORANG</p> <p>7. PESERTA PROGRAM PENSUNAN, SEBANYAK .....ORANG</p> <p>8. TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS), SEBANYAK .....ORANG</p> <p>• <b>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</b></p> <p>9. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS</p> <p>a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSUN SEBANYAK .....ORANG</p> <p>b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSUN PADA FORMULIR 1721-A SEBANYAK .....ORANG</p> <p>10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSUNAN, SEBANYAK .....ORANG</p> <p>• <b>PPh PASAL 26</b></p> <p>11. PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK .....ORANG</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p>	
12.	JUMLAH 1 s.d. 11 (Kecuali 9.b) .....ORANG				

Catatan :

1. Pindahkan angka 12 (jumlah 1 s.d. 11 kecuali 9.b) ..... orang) pada kolom (2) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (2);
2. Pindahkan jumlah pada kolom (3) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (3);
3. Pindahkan jumlah pada kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (4);
4. Pindahkan jumlah pada kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM  
2010/2011

DEPARTEMEN KEUANGAN  
DIREKTORAT JEREBEL PAJAK

NPWP : 101011171341215010117101010 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. INDOBARAYA SARANA

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (5)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah) (6)
1	IR. YUZAR DISWARTO	6.482.9278.027	DIREKTOR	—	—
2	KEMET DJUMAL TAHIR	06.085764-6.016.000	KOMISARIS	—	—

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JENIS KEAHLIAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (5)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah) (6)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah) (7)
(1)	—	—	—	—	—	—

Catatan : Jika ruangan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitria Rachmawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Juni 1985  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kayu Tinggi Gg. Anggur Rt.005/Rw. 004 No. 18  
Kel. Cakung Timur, Jakarta Timur 13910  
No. Telepon : (021) 46820645 / 085695287045

### PENDIDIKAN

1. TK "*Permata Indah*", Jakarta Timur Lulus Tahun 1991
2. SD Negeri 02 Pagi, Jakarta Timur Lulus Tahun 1997
3. SLTP Negeri 256, Jakarta Timur Lulus Tahun 2000
4. SMU Negeri 102, Jakarta Timur Lulus Tahun 2003
5. Universitas Darma Persada, Jakarta Timur Lulus Tahun 2007

Demikianlah keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, Juli 2007

Fitria Rachmawati